

CH. j. Enschede dan A. Heijder, 1982, *Beginselen van strafrecht*, Darde Durkalih bahasa R. Achmad Soema Di Pradja, Bnadung:Alimni.

Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP UNDIP.

Daniel V. Davidson, Brenda E.Knowles, Lynn M. forsthe, Robert R. Jespersen, *Chomprehensive Businees Law, Principle and cases*, Boston: Massachusets, Ken Publising Company.

Dwidja Priyatno, 1990, “Suatu Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana dan Prospeknya” Tesis S2, Jakarta: Fakultas pascasarjana KPK UI-UNDIP.

_____, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana.

Garner, Bryan A. 1999, (Editor In Chief), *Black’s Low Dictionary*, seventh Edition, St Paul, Minim, West Publising Co.

H. Setiyono, 2003, “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Malang: Banymedia Publishing.

J.E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Eresco .

Loebby Loqman, , 1993, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO.

Mardjono Reksodiputro, 1998, Tinjauan Perkembangan terhadap Delik-delik khusus dalam Masyarakat yang mengalami modernisasi, Jakarta, Sinar Harapan.

Moctar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bukur, Bandung, Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,

Nina H.B. Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding), Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.

Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni

Rudi Prasetyo, 1989, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, Semarang, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP.

Riduan Syahrini, 1999, Rangkuman intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citar Aditya Bakti.

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang : Bayumedia Publishing.

Soedjono Dirdjosisworo, 1991, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat pasca industry. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH*, Bandung : UNPAR.

Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT. Pembangunan

Subekti dan R. Tjitrosoudiblo, , 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarta, 1988, *Hukum Pidana 1*, semarang, Badan Penyediaan Bahan-Bahan kuliah FH UNDIP.

Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian hukum di Indonesia pda akhir abad ke 20*, Bandung:Penerbit Alumni.

Suparto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaya,

Susanto, I.S. 1998, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi,"Makalah pada penataran hukum Pidana Kriminologi, Semarang FH UNDIP.

Victor Purba, 1999, Perkembangan dan struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta Jakarta, Badan Penerbit FH UI

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia

_____Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951, LN 1951-4 tentang pertanyaan berlakunya Undang-undang kecelakaan 1947 Nomor 33 dari RI untuk seluruh Indonesia.

_____Undang-undang Nomor 3 tahun 1951, LN 1951-4 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang pengawasan perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia,

_____Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951, LN 1951-78, Undang-undang tentang senjata Api.

_____Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, LN 1953-18, Undang-undang tentang pembukaan Apotik.

_____Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

_____ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, LN 1981-11, Undang-undang tentang Metrologi Legal.

_____ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982, LN 1982-7, Undang-undang tentang Wajib daftar Perusahaan.

_____ Undang-undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____ Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

_____ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

_____ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

_____ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

_____ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

_____ Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_____ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi.

C. INTERNET

Gobert dan Punch, 2018, Rethinking The Corporate Crime,
<http://maswig.blogspot.com>,

Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, 2018,
<http://pithoyoadhi.wordpress.com>,

Muhammad Indra Kusumayudha, 2018, Penanganan Tindak Pidana Oleh
Korporasi: Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor: 13 Tahun 2016, www.hukumpedia.com